

PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG)

THE EFFECT OF THE FAIRNESS OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY (EMPIRICAL STUDIES AT SKPD OF TEMANGGUNG REGENCY)

Oleh : Dian Dharmaningtyas

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

ddharmaningtyas@gmail.com

Ngadirin Setiawan

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek (1) Kesesuaian dengan SAP, (2) Kecukupan Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap Undang-undang dan (4) Efektivitas sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan, serta (5) Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap akuntabilitas Keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan t hitung = 3,947 dan $r^2_{1y} = 0,091$, (2) Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan t hitung = 1,864 dan $r^2_{2y} = 0,022$ (3) Kepatuhan terhadap Undang-undang berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan t hitung = 1,806 dan $r^2_{3y} = 0,021$ (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan t hitung = 7,555 dan $r^2_{4y} = 0,269$ (5) Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, ditunjukkan dengan F hitung = 15,139, dan $R^2_{y(1,2,3)} = 0,285$.

Kata kunci: Kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesesuaian dengan SAP. Kecukupan

Pengungkapan. Kepatuhan terhadap Undang-undang. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Akuntabilitas Keuangan

Abstract

This research is conducted to examine the effect of the fairness in financial statement presentation in (1) suitability of SAP (2) adequate of disclosure (3) obedience of the constitution (4) the effectiveness of intern control system aspects on financial accountability (5) the effect of the fairness in financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system aspects together on financial accountability. Data collection techniques used a questionnaire. The results showed that: (1) suitability of SAP aspect has positive effect on financial accountability, indicated by the t value = 3.947 and $r^2_{1y} = 0.091$, (2) adequate of disclosure aspects has positive effect on financial accountability, indicated by the t value = 1.864 and $r^2_{2y} = 0.022$, (3) obedience of the constitution aspect has positive and significant effect on financial accountability, indicated by t value = 1.806 and $r^2_{3y} = 0,021$ (4) effectiveness of intern control system aspect has positive effect on financial accountability, indicated by t value = 7,555 $r^2_{4y} = 0,269$ (5) the influence of the fairness in financial statement presentation in suitability of SAP, adequate of disclosure, obedience of the constitution, and the effectiveness of intern control system aspects together have positive effect on financial accountability, indicated by the F value = 15,139, and $R^2_{y(1,2,3)} = 0,285$.

Keywords : Fairness of financial statement presentation. Suitability of SAP. Adequate

of disclosure. Obedience of the constitution. The effectiveness of intern control system financial accountability. Financial accountability.

PENDAHULUAN

Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan dapat lebih *accountable* dan berkualitas. Sejalan dengan Mira Tania (2010) menyatakan bahwa laporan tahunan (laporan keuangan), meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas. Ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan).

Indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Komponen LKPD meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil opini BPK RI atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD masing-masing tahun tersebut. BPK menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2012 dan 2013, realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAP 2005.

BPK menyatakan penyajian Aset yang tercantum di Neraca tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya telah dilakukan sensus namun masih perlu tindak lanjut untuk menentukan kejelasan aset senilai Rp 9,65 miliar dan aset tetap pada daerah irigasi. Selain itu, sejak tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menggunakan aset milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI), atas penggunaan lahan tersebut PT. KAI mengenakan sewa yang jumlahnya belum disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas penyajian LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014, terdapat kurang saji atas Hutang kepada PT. KAI. Aset milik PT. KAI sebanyak 14 bidang tanah dan bangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, biaya sewanya belum dibayar dari tahun 2002 sampai dengan 2014. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akruwal Pernyataan No. 09. Permasalahan tersebut diketahui disebabkan oleh belum adanya kesepakatan nilai sewa antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan PT. KAI.

Kurang saji Hutang sewa atas penggunaan Aset milik PT. KAI merupakan indikasi terdapat kekurangan pada pengungkapan laporan keuangan. Penyebab permasalahan kurang saji Hutang sewa tersebut tidak diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah pengungkapan cukup. Informasi yang diungkapkan sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan terutama informasi yang menurut lembaga terkait wajib disajikan.

Temuan BPK atas penyajian LKPD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 mengindikasikan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. BPK

mengemukakan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap dan Aset Lainnya kurang memadai, dan Hutang kepada PT. KAI belum disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain terdapat kelebihan pembayaran atas sebelas pekerjaan pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp.940.827.564,49 dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar Rp.164.998.050,00.

Dalam rentang waktu singkat yaitu 4 tahun sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami konsep Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal. Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Pegawai bagian Keuangan, terkait konsep Akuntansi berbasis Akruwal akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Pegawai bagian Keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening

dalam laporan keuangan pemda. Dalam hal ini, umumnya pemda memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi secara baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan”**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Responden dalam penelitian adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Proses penelitian telah dilakukan pada bulan Februari - Maret 2016.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Temanggung yang berjumlah 72 SKPD. Populasi sasaran yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian sebanyak 228 responden dengan sampel sebanyak 168 responden. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2014: 68). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah Pegawai bagian Keuangan yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan pada tiap entitas akuntansi keuangan daerah dan jika terdapat rangkap jabatan tidak lebih dari 1. Kualifikasi Pegawai penyusun laporan keuangan SKPD dalam penelitian ini adalah: a) Pejabat Pengelola Keuangan (PPK); b) Bendahara Kas/Umum; c) Pencatat Pembukuan; d) Pembuat Dokumen.

Prosedur

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode survei dengan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Jenis angket dalam penelitian yaitu angket tertutup, di mana responden hanya memberi jawaban sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh peneliti, alternatif jawaban sudah tersedia.

Data, Instrumen, dan Teknik Analisis Data

Data dan Instrumen

Data penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diberikan kepada Pegawai bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung. Kuesioner akan dibagikan

secara langsung kepada responden untu diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode yang sesuai untuk membuktikan hipotesis yang dibuat.

Masing-masing variabel diukur menggunakan instrument penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati (Sugiyono, 2011:102). Berikut kisi-kisi instrument dalam penelitian ini:

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen

No	Variabel	Indikator	Referensi
1	Kesesuaian dengan SAP	a. Berdasarkan asumsi dasar	PP No 71 Tahun 2010
		b. Memuat karakteristik laporan keuangan	
		c. Berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan	
		d. Memuat unsur – unsur laporan keuangan	
2	Kecukupan Pengungkapan	a. Informasi tentang kebijakan	PP No 71 Tahun 2010
		b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	
		c. Dasar penyusunan laporan keuangan	
		d. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih	
		e. Informasi wajib sesuai SAP	
		f. Informasi pos-pos aset dan kewajiban	
3	Kepatuhan terhadap Pearturan Perundang-undangan	a. Ketentuan penyajian informasi keuangan secara asas bruto	PSP BPK Nomor 03.01
		b. Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah target yang harus dicapai	
		c. Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi yang signifikan	
		d. Ketentuan penerimaan dan pengeluaran diadministrasikan dalam anggaran	
4	Efektivitas SPI	a. Pengendalian pencatatan akuntansi	PSP BPK Nomor 03.01
		b. Pengendalian pelaporan keuangan	
		c. Pengendalian	

	pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah		
	d. Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	e. Struktur pengendalian intern		
5	Akuntabilitas Keuangan	a. Tertib	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
		b. Taat pada peaturan perundang-undangan	
		c. Efektif	
		d. Efisien	
		e. Ekonomis	
		f. Transparan	
		g. Bertanggungjawab	
		h. Keadilan	

Teknik skala pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan modifikasi skala *Likert*.

Tabel 2. Modifikasi Skala *Likert*

Indikator	Positif	Negatif
Sangat Setuju/ Sangat Sering (SS)	4	1
Setuju/ Sering (S)	3	2
Tidak Setuju (TS)/ Jarang (J)	2	3
Sangat Tidak Setuju (STS)/ Sangat Jarang (SJ)	1	4

Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Pegawai bagian Keuangan dari 14 SKPD di luar sampel penelitian. Uji coba instrumen terdiri dari uji validitas data dan uji reliabilitas data. Uji validitas menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari *Pearson Correlation* dan Uji reliabilitas data dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha*.

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua butir dalam instrumen dinyatakan valid (r hitung > r tabel). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa instrumen pada variabel Akuntabilitas Keuangan (0,964), Kesesuaian dengan SAP (0,959), Kecukupan Pengungkapan (0,956), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (0,924) dan

Efektivitas SPI (0,977) lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh, dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji asumsi klasik. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini, dilakukan agar model regresi signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji linieritas menggunakan *Test for Linierity* dengan taraf signifikansi 5%. Hubungan antar variabel dapat dikatakan linear apabila nilai signifikansi $>0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $<0,05$, maka menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak linear.

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut.

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance Value}}$$

Uji heteroskedastisitas menggunakan analisis dengan uji *glesjer*. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat apabila probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan rumus analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana antara lain:

- 1) Membuat garis linear sederhana

$$Y' = a + bX$$

- 2) Mencari koefisien determinasi (r^2)

$$r^2(X_n Y) = \frac{a_n \sum X_n Y}{\sum Y^2}$$

- 3) Uji t

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

Apabila t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individual, hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel pada taraf signifikansi 5% berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat secara individual dan hipotesis ditolak.

Adapun analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, secara bersama-sama, terhadap variabel terikat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat persamaan garis dengan tiga prediktor

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

- 2) Mencari koefisien determinasi (R^2) antara X_1 , X_2 , dan X_3

$$R_y^2(x_1, x_2, x_3) = \frac{(a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y + a_3 \sum X_3 Y)}{\sum Y^2}$$

- 3) Uji F

$$F_{reg} = \frac{r^2(N - m - 1)}{m(1 - r^2)}$$

Pengambilan keputusan, nilai F hitung ini dikonsultasikan dengan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika F hitung sama dengan atau lebih besar dari F tabel, maka hipotesis alternatif diterima dengan kata lain variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis alternatif ditolak dengan kata lain variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini meliputi Minimal, Maksimal, *Mean*, dan Standar Deviasi (SD). Berikut ini adalah hasil analisis statistik deskriptif dari data penelitian:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	SD
Akuntabilitas Keuangan	157	56	75	64,69	3,86
Kesesuaian dengan SAP	157	41	64	55,84	3,24
Kecukupan Pengungkapan	157	49	76	60,60	5,67
Kepatuhan terhadap UU	157	28	39	33,19	2,39
Efektivitas SPI	157	45	58	50,09	2,55

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Hasil Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji linieritas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian linieritas dalam penelitian ini menggunakan *Test for Linierity* pada *SPSS Statisticks 20* dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Linieritas

Variabel	F Hitung	Deviation from Linearity	Keterangan
X_1 dengan Y	1,464	0,144	Linear
X_2 dengan Y	1,262	0,206	Linear
X_3 dengan Y	1,995	0,450	Linear
X_4 dengan Y	1,260	0,258	Linear

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Linierity* untuk masing-masing variabel terhadap variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dinyatakan linier.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya multikolinieritas antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS Statisticks* 20 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁	0,751	1,332	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X ₂	0,529	1,892	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X ₃	0,546	1,832	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X ₄	0,836	1,196	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan *SPSS Statisticks* 20 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig t	Keterangan
X ₁	0,443	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X ₂	0,351	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X ₃	0,438	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X ₄	0,269	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa tidak satupun variabel bebas yang signifikan

secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolut. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, atau nilai signifikansi variabel bebas > 0.05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana digunakan menguji hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, dan hipotesis keempat. Hasil dari uji regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Hipotesis	Const	Koef	t Hitung	t Tabel	Sig.	r ²
H1	44,619	0,359	3,947	1,654	0,000	0,091
H2	58,575	0,101	1,864	1,654	0,032	0,022
H3	56,992	0,023	1,806	1,654	0,037	0,021
H4	25,280	0,787	7,555	1,654	0,000	0,269

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa variabel Kesesuaian dengan SAP (X₁) pada Hipotesis I memiliki persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 44,619 + 0,359 X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Kesesuaian dengan SAP dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 44,619 satuan. Jika variabel Kesesuaian

dengan SAP naik sebesar satu satuan, maka meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,091, Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP adalah sebesar 9,1%. Nilai t hitung $>$ t tabel ($3,947 > 1,654$) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan, maka hipotesis I diterima.

Variabel Kecukupan Pengungkapan (X_2) pada Hipotesis II memiliki persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 58,575 + 0,101 X_2$$

Variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 58,575 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kecukupan Pengungkapan naik sebesar satu satuan,

maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,022. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan adalah sebesar 2,2%. Nilai t hitung $>$ t tabel ($1,864 > 1,654$), mengindikasikan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan, maka hipotesis II diterima.

Variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_3) pada Hipotesis III memiliki persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 56,992 + 0,232 X_3$$

variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 56,992 satuan. Dari

persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,021. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar 2,1%. Nilai t hitung $>$ t tabel ($1,864 > 1,654$), mengindikasikan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan, maka hipotesis III diterima.

Variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X_4) pada Hipotesis IV memiliki persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 25,280 + 0,787 X_4$$

Nilai variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka perubahan Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 25,280 satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif menunjukkan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka akan semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan. Nilai koefisien determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,269. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 26,9%. Nilai t hitung $>$ t tabel ($1,864 > 1,654$), mengindikasikan bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap variabel

Akuntabilitas Keuangan, maka hipotesis IV diterima.

Hasil pengujian analisis regresi berganda untuk uji hipotesis V dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Const	Koefisien Beta	R ²	F Hitung	F Tabel
X1		0,169			
X2	21,258	0,050	0,285	15,139	2,430
X3		0,065			
X4		0,728			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, secara bersama-sama, memiliki persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 21,258 + 0,169 X_1 + 0,050 X_2 + 0,065 X_3 + 0,728 X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui nilai konstanta sebesar 21,258 dapat diartikan jika seluruh variabel independen dianggap konstan, Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka nilai variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan adalah sebesar 21,258 satuan.

Nilai koefisien regresi Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kesesuaian dengan SAP, sedangkan variabel Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,169 satuan. Nilai koefisien regresi Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kecukupan Pengungkapan, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,050 satuan. Nilai koefisien regresi Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 0,065 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,065 satuan. Nilai koefisien regresi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,728 diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan pada variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sedangkan variabel Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan

Pengungkapan, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dianggap konstan, maka variabel dependen, Akuntabilitas Keuangan akan naik sebesar 0,728 satuan.

Nilai koefisien determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,285. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern adalah sebesar 28,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Uji F yang dilakukan menghasilkan nilai F hitung $>$ F tabel ($15,139 > 2,43$), dapat dinyatakan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan, maka hipotesis V diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek

Kesesuaian dengan SAP (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,359 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kesesuaian dengan SAP sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,359 satuan. Nilai t hitung 3,947 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($3,947 > 1,654$) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima..

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan BPK, dimana syarat dari kewajaran penyajian laporan keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Menurut Renyowijoyo (2008:171) salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan

2. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,101 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kecukupan Pengungkapan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,101 satuan. Nilai t hitung 1,864 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($1,864 > 1,654$) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis kedua yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Berdasarkan hasil kuesioner untuk item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Kecukupan Pengungkapan (X_2) menunjukkan mayoritas jawaban responden pada kategori sangat

setuju dan setuju. Hal ini berarti penyajian laporan keuangan SKPD Kabupaten Temanggung diungkapkan secara lengkap. Namun berdasarkan pengamatan atas permasalahan yang dipaparkan dalam catatan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Temanggung TA 2014. Catatan tersebut bahwa sebagian dari aset tetap berupa daerah irigasi di Kabupaten Temanggung belum tercatat dan besaran utang sewa tanah PT Kereta Api Indonesia yang digunakan Pemkab belum tersajikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan informasi secara lengkap belum terpenuhi. Sesuai dengan kontribusi pengaruh variabel Kecukupan Pengungkapan (X_2) dalam penelitian ini adalah yang paling rendah.

3. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,232 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,232 satuan. Nilai t hitung 1,806 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($1,806 >$

1,654) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Penilaian BPK tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya berdasarkan kepatuhan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan merupakan landasan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Undang-undang terkait penyajian laporan keuangan antara lain ketentuan penyajian informasi keuangan, ketentuan belanja dan pendapatan, ketentuan pengungkapan atas anggaran dan realisasi, serta ketentuan terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Penjelasan Undang-undang terkait penyajian laporan keuangan dipaparkan secara spesifik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel Kewajaran

Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X_4 sebesar 0,787 menyatakan bahwa setiap kenaikan Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 1 satuan akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,787 satuan. Nilai t hitung 7,555 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($7,555 > 1,654$) mengindikasikan bahwa Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima.

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Semakin baik penerapan efektivitas sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, sangat diperlukan penerapan sistem pengendalian intern secara efektif. Sistem pengendalian intern dapat digunakan oleh manajemen pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan operasi atau kegiatan pemerintah. Sistem pengendalian intern

merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan/sasaran dan menjamin tersedianya informasi laporan keuangan yang berkualitas.

5. Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP (X_1), Kecukupan Pengungkapan (X_2), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X_3) dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (X_4) secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dibuktikan oleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 15,139 ($15,139 > 2,43$) dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,050$). Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesesuaian dengan SAP sebesar 0,169, variabel Kecukupan Pengungkapan sebesar 0,050, variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang sebesar 0,065, dan variabel Efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,720. Semua nilai koefisien regresi memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajar penyajian laporan keuangan berdasarkan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan,

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, maka Akuntabilitas Keuangan akan semakin tinggi.

Penelitian ini juga mendukung teori dari Mardiasmo (2004) yang menjelaskan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas dan transparansi adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CALK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas keuangan sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah.

Penelitian ini mendukung berbagai penelitian terdahulu diantaranya penelitian Putu Sri Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dari Pautina Indriyani (2011) yang menyatakan secara parsial dan simultan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Penelitian lainnya oleh Iqbal Nasution (2009), penelitian tersebut menyatakan

bahwa penyajian neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan pemerintah daerah maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Wajar berarti penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan SAP, kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah terdapat sistem pengendalian intern yang efektif dalam hal pelaporan/penyajian laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP (X_1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kesesuaian dengan SAP menghasilkan nilai t hitung 3,947 lebih dari

nilai t tabel sebesar 1,654 ($3,947 > 1,654$).

(2) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kecukupan Pengungkapan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kecukupan Pengungkapan menghasilkan nilai t hitung 1,864 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($1,864 > 1,654$).

(3) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kepatuhan terhadap Undang-undang (X_3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Kepatuhan terhadap Undang-undang menghasilkan nilai t hitung 1,806 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($1,806 > 1,654$).

(4) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Uji t statistik untuk variabel Efektifitas Sistem Pengendalian Intern menghasilkan nilai t hitung 7,555 lebih dari nilai t tabel sebesar 1,654 ($7,555 > 1,654$).

(5) Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan aspek Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Undang-undang dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dilihat dari hasil regresi linear berganda bahwa yang menghasilkan nilai F Hitung sebesar $15,139 > F$ tabel 2,430.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat. Pertama, bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu (1) Publikasi dan aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung lebih diperhatikan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas; (2) Upaya peningkatan pemahaman terkait Akuntansi berbasis Akrua Pegawai bagian Keuangan SKPD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan; (3) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban lebih diperhatikan; (4) Instansi SKPD diharapkan dapat melakukan verifikasi atas penerapan asas bruto pada nilai transaksi/kegiatan; (5) Perbaikan struktur pengendalian intern pada SKPD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan; (6) Kontribusi tertinggi pengaruh Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan yaitu Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, disarankan kepada Pemda Kabupaten Temanggung lebih meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan variabel lain terkait Akuntabilitas Keuangan. Penyebaran kuisisioner dapat disertai dengan metode wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, sebaiknya

peneliti yang akan datang melakukan pengamatan secara lebih mendalam dan secara menyeluruh di semua tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Peneliti selanjutnya menggunakan responden yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2008). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Exposure Draft)*. Jakarta: KSPKN
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). "Seluruh LHP LKPD TA 2014 Telah Diserahkan", 4 Juni 2015. Diakses melalui <http://semarang.bpk.go.id/?p=5793> pada tanggal 10 November 2015
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mira Tania. (2010). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Subang*. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia
- Putu Sri Wahyuni. (2014). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Badung)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* (Vol 2 No 1 Tahun 2014). Hlm 64 – 75.
- Renyowijoyo, Muindro. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Ritonga, Irwan Taufiq. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah.

- Saufi Iqbal Nasution (2010). Pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukhemi. (2010). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 5, April: 85-100
- Surya Metta Silany. (2013). Pengaruh penyajian neraca daerah dan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah : (studi kasus pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia